

Perebutan Pengaruh Politik di Daerah Khusus Jakarta: Analisis Konflik Kepentingan Antara Elit Nasional dan Lokal Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2024

Abdul Aziz Hamdi¹ Pujo Widodo² Eko G Samudro³ Rachmat Setiawibawa⁴ Arifuddin Uksan⁵

Progrm Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: abdul.hamdi@kn.idu.ac.id¹

Abstract

The 2024 Jakarta gubernatorial election highlights the ongoing power struggle between national and local elites, reflecting broader political dynamics in Indonesia. As the capital city, Jakarta holds strategic importance, making its leadership contest not only a regional but also a national concern. The conflict between these two elite groups arises from differences in political interests, where national elites prioritize political stability and party dominance, while local elites focus on policies directly impacting Jakarta residents. This study aims to analyze the key factors that intensify this conflict and examine its impact on the electoral process and policy-making. Using a qualitative research approach with a literature review method, this study identifies four major drivers of conflict: divergent political agendas, national political interventions, identity politics, and communication gaps between elites. The findings indicate that these conflicts significantly affect candidate selection, campaign strategies, and governance after the election. Additionally, political polarization fueled by identity-based narratives has led to declining voter participation, increased invalid ballots, and eroding public trust in democracy. The study suggests that electoral reforms, increased transparency in political processes, and better coordination between national and local authorities are essential to mitigating elite conflicts and fostering a more democratic and representative electoral system in Jakarta.

Keywords: Elite Conflict, Jakarta Election, Identity Politics, Electoral Reform



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur Jakarta selalu menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Indonesia. Sebagai mantan ibu kota negara, Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga menjadi barometer politik nasional yang merefleksikan tarik-menarik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal (Wibowo et al., 2024; Muhtadi, 2024). Konflik kepentingan ini bukan fenomena baru. Sejarah politik Jakarta menunjukkan bahwa setiap kontestasi selalu dipengaruhi kepentingan yang melampaui ranah regional (Putri & Indrawan, 2025). Elit nasional, yang terdiri dari pemimpin partai besar, pejabat pusat, dan kelompok bisnis strategis, cenderung berfokus pada stabilitas dan konsolidasi kekuasaan nasional (Wadipalapa, 2025). Sebaliknya, elit lokal seperti pemimpin daerah, kelompok masyarakat sipil, dan pengusaha lokal lebih mengutamakan isu-isu spesifik Jakarta, misalnya transportasi publik, tata ruang, dan kesejahteraan masyarakat (Rahmayanty & Wahyuningroem, 2025). Beberapa faktor memperburuk konflik ini. Pertama, perbedaan kepentingan politik: elit nasional menekankan agenda makro, sementara elit lokal menyoroti kebutuhan warga (Salsabila et al., 2025). Kedua, campur tangan politik pusat melalui regulasi atau intervensi partai yang mengamankan kandidat tertentu (Zuhro, 2021). Ketiga, politik identitas berbasis agama dan etnis yang memperkuat polarisasi (Ibrahim et al., 2024). Selain itu, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara kedua kubu membuat kebijakan pasca pemilihan sering tersendat (Andriyani et al., 2021).

Konsekuensi konflik ini terlihat pada keterlambatan pengesahan anggaran, terhambatnya proyek infrastruktur strategis, hingga dampak geopolitik yang lebih luas (Khan, 2024).

Polarisasi yang terbentuk selama kampanye juga meningkatkan fragmentasi sosial dan berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban di Jakarta (Setiawati et al., 2023). Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor dominan yang memperburuk konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024, sekaligus menelaah dampaknya terhadap proses elektoral dan kebijakan publik di Jakarta. Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori elitisme C. Wright Mills dan teori konflik sosial Ralf Dahrendorf. Teori elitisme menjelaskan konsentrasi kekuasaan pada lingkaran elit nasional yang berupaya mempertahankan dominasi (Mills, 1956), sedangkan teori konflik sosial membantu menelaah bagaimana pertarungan tersebut memicu polarisasi, memengaruhi kohesi sosial, dan mengurangi efektivitas kebijakan publik (Dahrendorf, 1959).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena politik berdasarkan data sekunder yang telah terdokumentasi, seperti jurnal akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel media yang relevan. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman makna, interpretasi fenomena, serta penyajian deskriptif dalam konteks alami (Creswell, 2014). Sementara itu, Zed (2004) menekankan bahwa studi pustaka merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah literatur atau sumber tertulis untuk memperoleh dasar teoritis dan konseptual yang mendukung analisis (Zed, 2004). Dengan demikian, studi pustaka menjadi landasan penting untuk membangun kerangka analisis penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dengan cara menelaah literatur yang membahas konflik kepentingan pada pemilihan gubernur Jakarta sebelumnya, guna mengidentifikasi pola-pola yang muncul kembali dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Sumber data mencakup penelitian akademik terdahulu, laporan lembaga pemantau pemilu, serta publikasi universitas dan lembaga penelitian politik. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi agar diperoleh gambaran yang lebih objektif dan menyeluruh. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi pola, wacana, dan dinamika konflik kepentingan dalam literatur. Menurut Krippendorff (2019), analisis isi memungkinkan peneliti menarik kesimpulan yang sah dan dapat diuji ulang, dengan tetap memperhatikan konteks dari data yang dianalisis (Krippendorff, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teori Elitisme (C. Wright Mills)

Dalam *The Power Elite*, Mills (1956) menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern tidak terbagi merata, melainkan terpusat pada kelompok elit kecil yang menguasai tiga institusi utama: militer, ekonomi, dan politik. Elit ini membentuk jaringan pengaruh yang mampu menentukan arah kebijakan tanpa keterlibatan publik yang luas, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam praktik demokrasi. Dalam konteks Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024, teori Mills menunjukkan bahwa kekuasaan politik cenderung dikuasai oleh elit nasional yang memiliki koneksi erat dengan sektor ekonomi, politik, dan militer. Konsentrasi kekuasaan ini membuat aspirasi lokal sering terpinggirkan demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Teori Konflik Sosial (Ralf Dahrendorf)

Berbeda dengan Mills, Dahrendorf (1959) menekankan bahwa konflik sosial lahir dari distribusi otoritas yang timpang. Setiap struktur sosial selalu terdiri dari kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang tidak memilikinya, sehingga pertentangan keduanya menjadi motor perubahan sosial. Tidak seperti Marx yang menitikberatkan pada konflik kelas ekonomi, Dahrendorf melihat konflik dapat terjadi di berbagai lembaga sosial, termasuk birokrasi dan politik. Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, ketegangan antara elit nasional dan elit lokal mencerminkan konflik struktural ini. Elit nasional, yang terdiri atas pemimpin partai besar dan tokoh pusat, berperan sebagai kelompok dominan yang berusaha mempertahankan pengaruh atas Jakarta sebagai pusat ekonomi-politik nasional. Mereka cenderung mendukung kandidat yang sejalan dengan agenda nasional serta mampu menjamin stabilitas pemerintahan pusat.

Faktor utama yang memperkuat konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024

Perbedaan Kepentingan Politik

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 tidak hanya menjadi ajang kontestasi kandidat, tetapi juga memperlihatkan pertarungan kepentingan antara elit nasional dan elit lokal. Elit nasional umumnya berorientasi pada stabilitas politik pusat, penguatan partai, dan konsolidasi kekuasaan di tingkat nasional (Putra & Siregar, 2024), sedangkan elit lokal lebih menekankan kebijakan praktis yang langsung dirasakan masyarakat, seperti transportasi publik dan kesejahteraan warga (Nani & Laksmono, 2023). Perbedaan kepentingan ini bukan hal baru. Konflik antara gubernur dan DPRD DKI Jakarta pada 2015, misalnya, memperlihatkan tarik-menarik antara agenda makro ekonomi nasional dan tuntutan pembangunan infrastruktur daerah (Djumadin, 2022). Hal serupa terlihat pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika Ahok didukung partai-partai nasional, sementara Anies mendapat dukungan kekuatan lokal yang lebih dekat dengan isu warga Jakarta (Akmaliah & Nadzir, 2021; Rahmayanty & Wahyuningroem, 2025). Dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, perbedaan kepentingan tersebut tercermin dalam penentuan kandidat, strategi kampanye, hingga pendanaan. Elit nasional mengandalkan jaringan partai, media mainstream, dan dukungan finansial dari jejaring bisnis nasional (Imansari, 2021; Darmawan, 2024), sedangkan elit lokal lebih mengutamakan mobilisasi akar rumput, relasi komunitas, dan dukungan finansial berbasis lokal (Supriatma, 2025; Mahsun, 2021). Jika dikaitkan dengan Teori Elitisme C. Wright Mills, fenomena ini menunjukkan bahwa kekuasaan politik tetap terkonsentrasi di tangan kelompok elit. Elit nasional berperan sebagai *power elite* yang mengendalikan arah kebijakan makro, sementara elit lokal mencoba mengartikulasikan kepentingan praktis masyarakat, namun tetap berada dalam orbit pengaruh kekuasaan nasional. Dengan demikian, kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta bukan hanya soal jabatan daerah, tetapi juga bagian dari konsolidasi kekuasaan elit dalam struktur politik nasional yang lebih luas.

Pengaruh Politik Identitas

Pemilihan Gubernur Jakarta kerap menjadi barometer politik nasional. Politik identitas, terutama berbasis agama dan etnis, terbukti berperan besar dalam membentuk persepsi pemilih (Farihi et al., 2024; Ibrahim et al., 2024). Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 menjadi contoh nyata bagaimana isu identitas memperdalam polarisasi masyarakat dan memengaruhi hasil pemilu (Susilowati, 2023). Dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2024, politik identitas tetap dominan karena kuatnya pengaruh isu agama dan etnis di Jakarta (Ardipandanto, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat utama dalam

menyebarkan politisasi identitas, terutama melalui isu keagamaan dan etnisitas (Karmila et al., 2024). Akibatnya, kampanye berbasis identitas ini menciptakan keterbelahan sosial semakin tajam dan sebagian kelompok merasa terpinggirkan dari arena politik. Politik identitas juga berpengaruh pada strategi pencitraan kandidat. Studi Metz & Plesz (2025) mengungkap bahwa pencitraan berbasis identitas mampu menciptakan keterikatan emosional yang lebih kuat dibandingkan kampanye berbasis program (Metz & Plesz, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan Hidayah et al. (2025) yang menekankan bahwa politik identitas cenderung lebih efektif dalam memengaruhi perilaku pemilih dibandingkan tawaran kebijakan substantive (Hidayah et al., 2025). Dampaknya, muncul populisme identitas yang membelah masyarakat menjadi dua kelompok yaitu “kita” yang dianggap benar secara moral dan “mereka” yang dianggap menyimpang. Studi kasus Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 juga menunjukkan perbedaan strategi populisme kandidat: Ahok menekankan populisme teknokratik, sedangkan Anies mengandalkan populisme sosial-demokratik yang lebih dekat dengan mayoritas Muslim (Gunawan & Paramita, 2024). Pola ini menegaskan bahwa politik identitas tidak hanya meningkatkan polarisasi, tetapi juga membentuk perilaku pemilih serta menggeser fokus pemilu dari isu kebijakan menuju pertarungan berbasis identitas.

Kurangnya Koordinasi dan Komunikasi

Kurangnya komunikasi yang efektif serta ego sektoral antar lembaga pemerintahan menimbulkan ketidaksepahaman dalam penyusunan strategi politik dan implementasi kebijakan pasca pemilihan. Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik memperburuk fragmentasi politik di Jakarta, sehingga mengancam stabilitas pemerintahan daerah (Guridno & Guridno, 2025). Dalam Pilkada 2024, miskomunikasi antara elit nasional yang mengusung agenda politik pusat dan elit lokal yang berfokus pada isu spesifik Jakarta berpotensi menghambat lahirnya kebijakan yang kohesif. Penelitian Fatimah et al. (2024) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi dalam penyusunan anggaran daerah sering menghasilkan kebijakan tidak sinkron dan memicu konflik politik berkepanjangan (Fatimah et al., 2024). Bahkan, ketidaksepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta telah memperlambat program strategis, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fauzan et al., 2025). Kurangnya komunikasi juga berdampak pada partisipasi masyarakat. Dharmawan et al. (2025) menemukan bahwa perbedaan narasi politik antar kandidat dan partai menurunkan kepercayaan publik sekaligus tingkat partisipasi pemilih (Dharmawan et al., 2025). Ketidaksepahaman serupa kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, terutama ketika isu yang diangkat disampaikan dengan pesan yang bertentangan atau terdistorsi di media. Lestari et al. (2025) menambahkan bahwa koordinasi yang buruk antar stakeholder politik pasca pemilihan menghambat implementasi kebijakan sosial dan pembangunan, terutama ketika konflik kepentingan tidak segera diselesaikan melalui dialog efektif (Lestari et al., 2025). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan transparansi komunikasi politik, mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara elit nasional dan lokal, serta pelibatan publik yang lebih luas dalam perumusan kebijakan pasca pemilihan.

Intervensi dan Manuver Politik Nasional

Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 kembali menjadi arena kontestasi politik yang tidak hanya melibatkan aktor lokal, tetapi juga sarat dengan intervensi politik nasional (Lestari et al., 2025). Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta memiliki nilai strategis bagi partai besar dan elit nasional. Fenomena ini tampak dari dukungan partai, perubahan regulasi, mobilisasi birokrasi, hingga eksploitasi isu nasional yang memengaruhi preferensi pemilih (Noer, 2024). Bentuk intervensi yang paling nyata adalah dukungan partai

politik nasional terhadap kandidat tertentu. Dukungan ini tidak sekadar berupa *endorsement*, tetapi juga mobilisasi sumber daya, dana kampanye, logistik, hingga pemanfaatan media massa untuk membangun citra kandidat (Mietzner, 2024). Pengalaman Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 menunjukkan bagaimana Ahok-Djarot mendapat dukungan PDI-P dan Golkar, sementara Anies-Sandiaga ditopang kekuatan oposisi (Akmaliah & Nadzir, 2021). Pola serupa berulang dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, ketika partai besar berusaha menempatkan kandidat yang dapat mengamankan kepentingan mereka menuju Pemilu 2024 (Wilson, 2024). Intervensi juga dilakukan melalui regulasi. Ambang batas pencalonan kepala daerah, pembatasan dana kampanye, maupun mekanisme debat publik sering diubah untuk menguntungkan kandidat tertentu (Luhukay & Murdoko, 2025; Puadi et al., 2025). Bahkan, instrumen hukum kerap digunakan untuk menekan kandidat atau partai lawan melalui revisi aturan, tekanan politik, hingga pemanfaatan aparat negara (Nabela & Arfa'i, 2023). Selain itu, birokrasi dan aparat negara kerap dimobilisasi untuk mendukung kandidat tertentu. Distribusi bantuan sosial, program pembangunan, hingga penggunaan ASN sering diarahkan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat yang didukung pemerintah pusat (Nurcholifah et al., 2025; Pratama et al., 2023). Tekanan politik terhadap media, dunia usaha, dan organisasi sosial juga mempersempit ruang netralitas politik (Sumarni, 2023).

Eksplorasi isu nasional pun menjadi strategi intervensi. Isu agama dan etnis yang dominan pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 masih membayangi, sementara isu baru seperti relasi Jakarta dengan pemerintah pusat, kebijakan ekonomi nasional, hingga pemindahan ibu kota ke IKN kini ikut dimanfaatkan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Perdana & Muslih, 2023; Wijaya & Perdana, 2025). Dengan demikian, intervensi politik nasional memperkuat konflik kepentingan antara elit pusat dan lokal. Dampaknya tidak hanya pada hasil pemilihan, tetapi juga pada efektivitas pemerintahan pasca pemilu. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan transparansi politik sangat penting untuk memastikan Pemilihan Gubernur Jakarta tetap demokratis serta tidak didominasi kepentingan nasional semata.

Dampak Konflik Kepentingan antara Elit Nasional dan Elit Lokal terhadap Pemilihan dan Kebijakan di Daerah Khusus Jakarta 2024

Penurunan Partisipasi Pemilih

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 diwarnai ketegangan politik antara elit nasional dan elit lokal yang berdampak pada menurunnya partisipasi pemilih. Konflik kepentingan membuat banyak warga merasa pertarungan politik lebih mengutamakan kepentingan elit dibandingkan kebutuhan rakyat, sehingga memicu apatisme (Hardiyanti & Fawaidi, 2025). Ketidakjelasan visi dan misi kandidat akibat tarik-menarik kepentingan juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi yang representatif (Dharmawan et al, 2025). Polarisasi politik yang tajam semakin memperburuk keadaan. Pemilih merasa terpinggirkan dari proses politik, sebagaimana ditunjukkan penelitian bahwa ketika pemilu dianggap dikendalikan elit, partisipasi politik masyarakat menurun (Kaharu et al., 2025). Fenomena ini tercermin dalam Pemilihan Gubernur sebelumnya, di mana lemahnya sosialisasi dan dominasi elit politik dalam kampanye menurunkan keterlibatan warga (Julita et al., 2025). Fragmentasi informasi dan maraknya disinformasi digital juga menambah keraguan publik. Pemilih sering menerima narasi bertentangan dari kubu elit yang bersaing, sehingga enggan berpartisipasi (Hidayat, 2025). Disinformasi dan kampanye hitam di media sosial memperkuat polarisasi, menjadikan pemilu lebih sarat manipulasi opini daripada dialog kebijakan yang konstruktif.

Lebih jauh, praktik oligarki politik dan transformasi partai menjadi sekadar mesin elektoral melemahkan fungsi representasi. Kondisi ini memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap partai politik, yang pada akhirnya menurunkan legitimasi demokrasi (Hidayat, 2025).

Ketidakpercayaan serupa juga menyasar penyelenggara pemilu. Jika publik melihat penyelenggara tidak netral dan dikendalikan elit, mereka cenderung menarik diri karena merasa suara tidak berpengaruh signifikan (Muhtadi, 2024). Dampak dari berbagai faktor tersebut terlihat jelas dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, di mana partisipasi pemilih hanya mencapai 57,52%, jauh menurun dibandingkan 77,02% pada pemilihan sebelumnya (Wijaya & Perdana, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal tidak hanya memengaruhi dinamika politik tingkat atas, tetapi juga menggerus kepercayaan publik serta merusak legitimasi demokrasi di Jakarta.

Peningkatan Suara Tidak Sah

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 menunjukkan peningkatan signifikan jumlah suara tidak sah dibandingkan pemilihan sebelumnya. Menurut Wijaya & Perdana (2025), penyebab utamanya antara lain dominasi koalisi besar yang membatasi pilihan kandidat, munculnya gerakan “coblos semua” sebagai bentuk protes, serta kekecewaan publik terhadap calon kompromi elit (Wijaya & Perdana, 2025). Konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal juga memperburuk kebingungan pemilih, sehingga sebagian memilih memberikan suara tidak sah sebagai ekspresi perlawanan politik. Data resmi Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 menunjukkan suara tidak sah mencapai 7,70%, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 yang hanya 3,50%. Angka ini mencerminkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kandidat maupun sistem politik yang dianggap semakin dikendalikan oleh kepentingan elit (Hendrawan & Agassi, 2024). Sebagian pemilih datang ke TPS, tetapi dengan sengaja merusak surat suara atau tidak memberikan tanda coblos yang sah sebagai bentuk protes pasif.

Faktor lain yang berkontribusi adalah minimnya pendidikan politik serta polarisasi akibat kampanye berbasis identitas (Silalahi et al., 2025). Pemilih yang merasa tidak mendapat penjelasan program kerja dengan jelas cenderung memilih untuk golput atau memberikan suara tidak sah (Hendrawan & Agassi, 2024). Strategi kampanye yang lebih menekankan konflik antar elit daripada visi kebijakan semakin memperkuat tren ini. Dengan meningkatnya suara tidak sah, terlihat indikasi bahwa publik makin skeptis terhadap proses politik. Jika tren ini berlanjut, legitimasi pemimpin terpilih bisa dipertanyakan dan kepercayaan terhadap demokrasi semakin terkikis. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan edukasi politik dan transparansi dalam pemilu agar pemilih merasa suaranya berpengaruh nyata dalam menentukan pemimpin Jakarta.

Polarisasi Masyarakat

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 kembali menunjukkan dampak besar politik identitas terhadap polarisasi masyarakat. Persaingan antara elit nasional dan lokal dalam mendukung kandidat tertentu memperdalam perpecahan sosial, terutama dalam bentuk segregasi berbasis agama dan etnis (Gunawan & Paramita, 2024). Fenomena ini bukan hal baru. Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 juga memperkuat fragmentasi sosial, ketika politik identitas digunakan sebagai strategi kampanye untuk membangun dukungan berbasis kelompok (Laksana et al., 2020). Pada Pemilihan Gubernur Jakarta 2024, narasi identitas semakin diperkuat melalui media sosial dan komunikasi politik. Strategi populisme berbasis identitas menonjolkan perbedaan antara “rakyat” dan “elit”, di mana kandidat yang dekat dengan elit nasional cenderung mengusung citra teknokratik, sedangkan kandidat yang lebih dekat dengan elit lokal mengadopsi populisme sosial dengan menekankan kedekatan dengan kelompok mayoritas (Gunawan & Paramita, 2024).

Dampak polarisasi tidak hanya terlihat dalam kampanye, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Polarisasi berbasis agama dan etnis memicu ketegangan antar kelompok, meningkatnya ujaran kebencian di media sosial, dan terbentuknya blok sosial eksklusif yang melemahkan solidaritas masyarakat (Laksana et al., 2020). Media sosial berperan penting dalam memperkuat keterbelahan ini dengan menyebarkan narasi identitas yang memobilisasi dukungan sekaligus memperkeruh opini publik. Lebih jauh, polarisasi masyarakat akibat politik identitas berpotensi mengancam stabilitas sosial dan demokrasi Indonesia. Maryono (2023) menekankan bahwa penggunaan politik identitas yang berlebihan dapat mengikis nilai persatuan nasional serta meningkatkan risiko konflik sosial di masa depan (Maryono, 2023). Karena itu, langkah pencegahan seperti literasi politik yang inklusif dan dialog antar kelompok sosial menjadi penting untuk meredam eskalasi polarisasi. Jika tidak dikelola, dampak polarisasi dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 dapat berlanjut dan mengancam kohesi sosial maupun stabilitas demokrasi di Indonesia.

Kebijakan Publik yang Terhambat

Konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 berdampak langsung pada jalannya pemerintahan, khususnya dalam pengambilan kebijakan publik. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif sering menimbulkan keterlambatan, bahkan kegagalan, dalam pengesahan kebijakan strategis yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat (Pamungkas et al., 2022). Salah satu dampak paling nyata adalah terhambatnya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada periode sebelumnya, konflik antara Gubernur dan DPRD mengakibatkan keterlambatan pengesahan anggaran sehingga pelaksanaan program publik tertunda. Polemik politik ini lebih sering berfokus pada perebutan pengaruh dan alokasi sumber daya ketimbang pada kepentingan masyarakat (Pamungkas et al., 2022).

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur dan tata kota juga kerap terhambat akibat tarik-menarik kepentingan pusat dan daerah. Proyek strategis seperti transportasi publik dan penyediaan fasilitas umum sering tertunda karena intervensi pemerintah pusat yang memiliki agenda politik berbeda (Safina et al., 2024). Dampak keterlambatan ini terasa luas, mulai dari terhambatnya penyaluran bantuan sosial hingga pelayanan kesehatan (Pamungkas et al., 2022). Konflik kepentingan yang berlarut-larut juga menciptakan ketidakpastian kebijakan jangka panjang. Investor dan pelaku usaha enggan berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta karena kondisi politik yang tidak stabil, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Beni, 2024). Jika situasi ini berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah akan semakin menurun, dan efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan publik semakin terganggu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif agar kebijakan publik dapat dijalankan tanpa hambatan politik yang berlebihan.

Manipulasi Proses Pemilihan

Manipulasi regulasi pemilu menjadi salah satu faktor yang memperburuk konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Elit nasional berupaya mengubah aturan pemilu demi menguntungkan kandidat tertentu, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi (Pitono & Dharmawan, 2025). Salah satu bentuk manipulasi yang sering terjadi adalah intervensi terhadap aturan pencalonan, termasuk pembatasan calon independen dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal. Kebijakan ini membuka celah bagi kekuatan politik tertentu untuk memonopoli pencalonan dengan menghambat munculnya

pesaing yang tidak sejalan dengan agenda elit nasional (Hannan, 2023; Femiliona, 2025). Manipulasi juga terlihat dalam penggunaan teknologi pemilu. Penelitian Saetriyan (2024) menemukan bahwa sistem perhitungan suara rentan dimanipulasi oleh pihak yang memiliki akses terhadap infrastruktur digital. Tanpa mekanisme transparansi yang ketat, potensi manipulasi hasil suara dapat dimanfaatkan elit nasional untuk memastikan kemenangan kandidat tertentu (Saetriyan et al., 2024). Dampak dari praktik ini sangat signifikan. Ketika masyarakat menilai pemilu telah direayasa untuk kepentingan segelintir elit, partisipasi pemilih menurun, kepercayaan terhadap sistem demokrasi melemah, dan risiko aksi protes meningkat (Pitono & Dharmawan, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi proses pemilihan bukan hanya memperburuk konflik antara elit nasional dan lokal, tetapi juga mengancam stabilitas politik serta legitimasi demokrasi di Jakarta. Oleh karena itu, reformasi regulasi pemilu yang transparan dan adil sangat diperlukan. Tanpa perbaikan, pemilu hanya akan menjadi instrumen politik bagi elit tertentu, bukan mekanisme demokratis yang mencerminkan kehendak rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, konflik kepentingan antara elit nasional dan elit lokal dalam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 terutama dipengaruhi oleh perbedaan orientasi politik, strategi pencalonan, serta intervensi politik yang dilakukan melalui regulasi dan media. Elit nasional cenderung berfokus pada stabilitas politik nasional dan kepentingan partai besar, sementara elit lokal lebih mengutamakan kebijakan daerah yang langsung berdampak pada masyarakat Jakarta. Perbedaan ini tercermin dalam proses pemilihan kandidat, strategi kampanye, serta pendekatan politik yang digunakan, di mana elit nasional lebih mengandalkan jaringan partai dan media, sedangkan elit lokal mengedepankan mobilisasi komunitas dan pendekatan akar rumput. Selain itu, penggunaan politik identitas dalam kampanye semakin memperdalam polarisasi masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya apatisme politik, penurunan partisipasi pemilih, serta meningkatnya jumlah suara tidak sah. Konflik ini juga berkontribusi pada ketidakstabilan kebijakan pasca pemilihan, dengan keterlambatan pengesahan APBD dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur strategis akibat tarik-ulur kepentingan politik. Manipulasi dalam proses pemilihan, termasuk perubahan regulasi dan penggunaan sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Secara teoretis, dinamika ini dapat dijelaskan melalui perspektif elitisme Mills dan konflik sosial Dahrendorf. Menurut Mills, kekuasaan politik Jakarta tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi pada lingkaran kecil elit nasional yang memiliki akses besar terhadap sumber daya dan media, sehingga kepentingan lokal sering terpinggirkan. Sementara itu, Dahrendorf menekankan bahwa ketegangan antara elit nasional (sebagai kelompok dominan) dan elit lokal (sebagai kelompok subordinat) mencerminkan konflik struktural akibat distribusi otoritas yang tidak seimbang. Hal ini terlihat dalam munculnya resistensi politik berupa suara tidak sah, penurunan partisipasi, hingga fragmentasi sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi elit nasional. Dengan demikian, kontestasi Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 bukan hanya pertarungan elektoral, melainkan juga manifestasi dari konflik struktural antara kekuasaan elit pusat dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi regulasi pemilu, peningkatan transparansi politik, serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi ketegangan politik yang berdampak pada stabilitas pemerintahan di Jakarta. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam bagaimana konflik kepentingan antara elit nasional dan lokal dalam pemilihan kepala daerah mempengaruhi stabilitas politik dan demokrasi di

Indonesia, baik melalui analisis komparatif dengan daerah lain maupun studi mengenai dampak polarisasi politik terhadap kohesi sosial. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi peran media dalam membentuk opini publik serta strategi kampanye yang digunakan oleh masing-masing elit untuk memengaruhi pemilih. Reformasi kebijakan pemilu dan mekanisme pencegahan konflik kepentingan juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti guna mengurangi dominasi kepentingan nasional dalam politik lokal. Lebih lanjut, studi mengenai otonomi daerah dan pengaruh kebijakan pusat terhadap pemerintahan daerah dapat menjadi fokus penelitian lanjutan untuk memahami bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diperkuat tanpa menghambat otonomi politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmaliah, W., & Nadzir, I. (2021). The Unholy Alliance of Islamic Populism and Political Entrepreneur in Jakarta Election: The Aftermath Implications. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 6(1), 2503-4227. Retrieved from <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/dinika/article/view/3366>
- Amirudin., Abdullah, M.Z., & Risman. (2023). Strategi Politik Akar Rumput Dalam Pemenangan Haliana–Ilmiati Pada Pemilihan Serentak 2020 (Studi di Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi). *Jurnal Publicuho*, 6(1), 85-91. Retrieved from <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/94>
- Anasrullah, A., Djunaidi, A., & Candra, A. (2017). Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia. *CIVICUS Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1). Retrieved from <https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/781>
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastrri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah Lokal Dalam Penangan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39-64. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/61155>
- Ardipandanto, A. (2023). A brief study of actual and strategic issues: Efforts to prevent abuse of identity politics in the 2024 elections. Center for Parliamentary Analysis, DPR RI, XV (6/II/Puslit/March/2023). Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-6-II-P3DI-Maret-2023-203-EN.pdf
- Beni, R. (2024). Peran Baru dan Kekhususan Jakarta Pasca Pindah Ibu kota Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 409-432. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol54/iss2/6/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Darmawan, I. M. (2024). The High Cost of Politics in Indonesia: An Exploration of Multi-perspectives from Academics, Students, Executive Officials, and Legislative Candidates. *Journal of Governmental Studies*, 4(2), 115-127. Retrieved from <https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/index.php/bjgs/article/view/171>
- Dharmawan, R. A., Setyawan, K. G., Setiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilihan Pemula Di Wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya). *urnal Dialektika Pendidikan IPS*, 5(1), 52-68. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/PENIPS/article/view/65522>

- Djumadin, Z. (2022). Political Conflict Between The DKI Jakarta Governor and DPRD in The 2015 APBD Determination Process. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 2(1), 1–8. Retrieved from <https://al-kindipublisher.com/index.php/ijahs/article/view/2715>
- Farihi, H. R., Lukmantoro, T., & Hasfi, N. (2024). Analisis Framing Politik Identitas Pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam Pemberitaan Pilpres 2024 di Media Indonesia. *Interaksi Online*, 12(4), 938-952. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/47464>
- Fatimah, M, Haryanto, H, & Retnandari, N. D. . (2024). Central Local Government Relations In Regional Planning And Budgeting In Indonesia Between Autonomy And Control . *Policy & Governance Review*, 8(2), 131–153. Retrieved from <https://journal.iapa.or.id/pgr/article/view/922>
- Fauzan, M., Prasojo, H., Ardhanariswari, R., & Elfudllatsani, B. (2025). Balancing Power and Resolving Conflicts in the Collaboration between Regional Heads and DPRD in Indonesia's Decentralized Governance. *EDP Sciences*. Retrieved from https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2025/09/e3sconf_icma-sure2024_07004/e3sconf_icma-sure2024_07004.html
- Femiliona, F. (2025). Keadilan pemilu bagi calon perseorangan: Kasus Pilkada Sukoharjo 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2). Retrieved from <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/download/1882/169/5237>
- Gunawan, K. A., & Paramita, S. (2024). Konstruksi Aspek-Aspek Populisme Aktor Politik pada Media Online melalui Perspektif Identitas Sosial. *Koneksi*, 8(1), 132–141. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/27601>
- Guridno, E., & Guridno, A. . (2025). Political Conflict Around The Political Policy of The DKI Jakarta Regional Government to Close The Alexis Hotel . *Journal of Posthumanism*, 5(6), 2366–2384. Retrieved from <https://posthumanism.co.uk/jp/article/view/2344>
- Hannan, A. (2023). Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 5(1), 39–57. Retrieved from <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/17499>
- Hardiyanti, N.H. , & Fawaidi, A. (2025). Rendahnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Dan Ancaman Terhadap Demokrasi. *DIROSAT: Journal of Islamic Studies*, 10(1). Retrieved from <https://ejournal.unia.ac.id/index.php/dirosat/article/view/2051>
- Hendrawan, R., & Agassi, M.A. (2024). Penerapan Blank Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Solusi atau Anomali Bagi Demokrasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(2), 271-292. Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4711>
- Hidayah, A. R., Bajari, A., Hidayat, D. R., & Maryani, E. (2025). Shifting from Religious Populism to Authoritarian Populism: Two Decades of Identity Politics Dynamics in Indonesia. *Social Sciences*, 14(1), 45. Retrieved from <https://www.mdpi.com/2076-0760/14/1/45>
- Hidayat, S. (2025). Demokrasi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 3(1). Retrieved from <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jocer/article/view/99>
- Ibrahim, I., Haryadi, D., & Hidayat, N. (2024). The Manipulation of Identity Politics in Indonesian Electoral Democracy Today: Between Regulations and Practices. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 4211. Retrieved from <https://systems.enpress-publisher.com/index.php/jipd/article/view/4211/3185>
- Imansari, N. G. (2021). Konstruksi Berita Media assa dalam bingkai kapitalisme: Pemilihan bakal calon presiden 2024. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 47–62. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/view/31-04>

- Julita, J., Alfatah, D., & Faridah, F. (2025). Efektivitas Sosialisasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pilkada 2024 Kota Bengkulu. *Jurnal Stia Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, 11(1), 11-20. Retrieved from <https://jurnal.stiabengkulu.ac.id/index.php/jsb/article/view/205>
- Kaharu, H. N., Suleman, D., Djaafar, L., & Wantu, S. M. (2025). Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas. *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Eksakta*, 4(2), 146–161. Retrieved from <https://trilogi.pubmedia.id/index.php/trilogi/article/view/1526>
- Karmila, L., Rachmiate, A., K, S. S., Fardiah, D., Ahmadi, D., & Muhtadi, A. S. (2024). The Role of Social Media in The Political Construction of Identity: Implications for Political dan Democracy in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(14), 9171. Retrieved from <https://systems.enpress-publisher.com/index.php/jipd/article/view/9171>
- Khan, A. M. (2024). The geopolitics of global infrastructure projects: challenges and opportunities for health and wellbeing. *Oxford Open Infrastructure and Health*, 2. Retrieved from <https://academic.oup.com/ooih/article/doi/10.1093/ooih/ouae006/7766081>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Laksana, T.O.P., Al-Hamdi, R., & Gusmi, A.D. (2020). Politisasi Isu Pribumi pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 di Media Sosial. *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2). Retrieved from <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1870>
- Lestari, Y. S., Afriandi, F., & Abdillah, L. (2025). The Dynamics of Party Cartels: Obstacles to Reforms and Reinforcers of Political Corruption in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 12(2), 174–190. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/22927>
- Luhukay, R. S., & Murdoko, M. (2025). Ambang Batas Syarat Pencalonan Kepala Daerah Dalam Perspektif Putusan Nomor 60PUU-XXII2024. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 13(1). Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/18051>
- Mahsun, M. (2021). Elite Predatory Practices in The Budgeting Process of Local Business Politicians and Executive Elites. *International Journal of Political Studies*, 1(1), 22-35. Retrieved from <https://jurnal.fisip.uinsa.ac.id/index.php/IJPS/article/view/176>
- Metz, R., & Plesz, B. (2025). The Irresistible Allure of Charismatic Leaders? Populism, Social Identity, and Polarisation. *Politics & Governance*, 13, 9017. Retrieved from <https://www.cogitatiopress.com/politicsandgovernance/article/view/9017>
- Mietzner, M. (2024). Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Constrained Electoral Competition. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00027162241309436>
- Mills, C. W. (1956). *The Power Elite*. Oxford University Press.
- Muhtadi, B. (2024). Indonesia's Regional Elections: Electoral Competition limited by Cartel Politics. ISEAS – Yusof Ishak Institute. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/11/ISEAS_Perspective_2024_104.pdf
- Nabela, T. K., & Arfa'i, A. (2023). Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(3), 2988-7143. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/22189>

- Nani, S., & Laksmono, B. S. (2023). The Implementation of Transportation Inclusion As A Social Welfare Policy Supporting Students' Mobility in East Jakarta. *Interdisciplinary Social Studies*. Retrieved from <https://iss.internationaljournallabs.com/index.php/iss/article/view/454>
- Noer, H. H. (2024). Portrait of the Politicization of Indonesian Bureaucracy in the 2024 Election. *International Journal of Social Service and Research (IJSSR)*, 4(3), 752-769. Retrieved from <https://ijssr.ridwaninstitute.co.id/index.php/ijssr/article/view/735>
- Nurcholifah, S., Wulan, T. R., & Wuryaningsih, T. (2025). Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 412-427. Retrieved from <https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/988>
- Pamungkas, S. H. A., Daffaakbar, M. A., & Nurriky. (2022). Analisis Tata Kelola Kebijakan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia Berdasarkan Perspektif Adaptive Governance. *Journal of Social Development Studies*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JSDS/article/view/5226>
- Perdana, A.P., & Muslih, M. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum Mendatang. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 225 - 238. Retrieved from <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/400>
- Pitono, P., & Dharmawan, A. (2025). Analisis Framing Media Narasi.TV Dan Viva.Co.Id Dalam Pemberitaan Demonstrasi Peringatan Darurat Menolak Revisi Undang-Undang Pilkada 2024. *The Commercium*, 9(3), 27-37. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/67081>
- Pratama, W. Y., Baihaq, M. A., & Alqorni, A. W. (2023). Fenomena Politisasi Birokrasi Selama Pilkada Di Indonesia. *Moderat : , 9(3)*. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 517-534. Retrieved from <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/3133>
- Puadi, P., Bachtiar, B., & Wicaksono, F. W. (2025). Transformation of Electoral Regulations and Substantive Democracy in Post Reform Indonesia . *GOVERNORS*, 4(1), 174-182. Retrieved from <https://jurnal.itscience.org/index.php/governors/article/view/6495>
- Putra, S. S., & Siregar, M. . (2024). Populisme Versus Kekuasaan Elit: Dinamika Kandidat Vote Getter Dalam Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 61-85. Retrieved from <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/4096>
- Putri, A. N., & Indrawan, J. (2025). Political Dynamics Behind Ridwan Kamil's Electoral Performance in The 2024 Jakarta Special Region Election. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 7(1), 120-131. Retrieved from <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/23728/16987>
- Rahmayanty, K. S., & Wahyuningroem, S. L. (2025). Implementasi Kebijakan Anies Baswedan-JRMK sebagai Jaringan Informal terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 8(1). Retrieved from <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja>
- Saetriyan, F.A., Syahrani, I., Nurdiana, M., Fauzan, R., Rustandi, N.P, & Yurisha, S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 224-240. Retrieved from <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/283>
- Safina, S., Saepudin, E. A., Damayanti, A. S., Yani, L. R., Edista, L., & Cahyani, S. . (2024). Analisis Ekonomi Politik Neoklasik dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Journal of*

- Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 1(2), 137–142. Retrieved from <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/1302>
- Salsabila, U., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2025). The Dynamics of The 2024 Jakarta gubernatorial Election: Political Competition, Electoral Challenges, and Democratic Prospects. *Jurnal MEDIASAS:Media IlmuSyari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(1), 162–183. Retrieved from <https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/267>
- Setiawati, T., Tiara, A., & Mustika, S. (2023). Social media as a negative source of political news in a polarized society? Indonesian and Filipino students' perception. *Jurnal Komunikasi*, 17(2), 243-256. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/26791>
- Silalahi, M.M., Pinem, W., & Sembiring, G.S. (2025). Political Education Ahead of the 2024 Regional Election at SMAS Budi Satria Medan. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1). Retrieved from <https://rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/view/4092>
- Sumarni, L. (2023). Pemilu 2024 Dalam Agenda Media: Antara Simulakra, Hiperealitas, Dan Kekuasaan Oligarki. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4843–4864. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6335>
- Supriatma, M. (2025). Indonesia's Political Volunteer Organizations: Tools of Mobilization and of Patronage. ISEAS–Yusof Ishak Institute. Retrieved from https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/03/TRS3_25.pdf?
- Susilowati, D., & Ridwan, R. (2023). The Impact of Identity Politics in The 2017 DKI Elections on Anies' Electability Ahead of The 2024 Presidential Election. *Jurnal Administrare*, 10(2), 397-404. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/administrare/article/view/58194>
- Wadipalapa, R. P. (2025, 1 8). Beyond democracy's return: Jakarta's gubernatorial election and the mutation of toxic alliances. Retrieved from ISEAS - Yusof Ishak Institute: <https://fulcrum.sg/beyond-democracys-return-jakartas-gubernatorial-election-and-the-mutation-of-toxic-alliances/>
- Wibowo, K., Riyanta, S., & Daryanto, E. (2024). Dinamika Ketahanan Sosial Wilayah Pada Pemilu Serentak 2024 (Studi Di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 30(3), 317-333. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/100747/41126>
- Wijaya, D., & Perdana, A. (2025). Pencalonan Pilkada Jakarta 2024: Dominasi Koalisi Besar Partai Politik Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Pemilih. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(2). Retrieved from <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1644>
- Wilson, I. (2024, 11 21). ISEAS – Yusof Ishak Institute. Retrieved from ISEAS – Yusof Ishak Institute: <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2024-97-more-competition-less-opposition-indonesias-2024-regional-elections-by-ian-wilson>
- Zed, M. (2004). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhro, R. (2021). The Bureaucracy Neutrality in Indonesian Politics. *BASKARA : Journal of Business and Entrepreneurship*, 3(2). Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/8717>